



**Judul** : Saudi Resmi Buka Ibadah Umrah bagi Indonesia  
**Tanggal** : Rabu, 01 Desember 2021  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

# Saudi Resmi Buka Ibadah Umrah bagi Indonesia

*Meskipun pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan calon jemaah umrah asal Indonesia, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi para calon jemaah.*

**MOHAMAD FARHAN ZHUHRI**  
zhuhri@mediaindonesia.com

**K**EBIJAKAN pemerintah Arab Saudi mencabut suspend penerbangan langsung dari Indonesia menandakan dibukanya pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia. Keputusan itu berlaku mulai 1 Desember 2021.

"Pengumuman resmi pencabutan penutupan pintu masuk tersebut telah disampaikan pada 25 November 2021. Dengan pembukaan suspend tersebut, otomatis penyelengaraan ibadah umrah juga dibuka," kata Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Kesepakatan itu diperoleh, lanjutnya, setelah ia melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Menteri Urusan Islam, Dakwah,

dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdullatif bin Abdulaziz.

Untuk memperlancar pelaksanaan umrah tersebut, Menag pun meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mempercepat pembuatan skema pemberangkatan umrah pada 2021 agar tidak tertunda keberangkatan para jemaah ke Tanah Suci Mekah.

"Insya Allah untuk umrah ini saya sudah minta dirjen haji membuat skema *as soon as possible*, secepatnya, jadi jangan terlalu lama ditunda," ungkapnya

Yaqut menambahkan, meskipun pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan jemaah asal Indonesia melaksanakan umrah, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi para calon jemaah umrah.

Pertama, calon jemaah harus mendapatkan dosis lengkap vaksin covid-19. Bagi mereka yang diimunisasi dengan vaksin yang

## Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Langsung dari Indonesia

### Pemberlakuan

■ Mulai 1 Desember 2021

### Manfaat Pencabutan Larangan

■ Warga Indonesia diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa melalui negara ketiga selama 14 hari.  
■ Tidak lagi ada persyaratan booster.  
■ Kegiatan umrah dapat dilaksanakan kembali.

### Aturan Sebelumnya

#### Februari 2021

■ Arab Saudi memberlakukan larangan terbang untuk Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

#### Akhir Agustus 2021

■ Penerbangan dari Indonesia diperbolehkan secara langsung, tetapi dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi, baik mukim atau ekspatriat.

diakui pemerintah Arab Saudi (Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson, dan Moderna), mereka bisa langsung melaksanakan ibadah haji kecil itu setelah tiba di Tanah Suci.

### Jemaah Umrah yang Menjadi Prioritas Indonesia

■ Terdapat 59.757 jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya akibat covid-19.

■ 18.752 jemaah di antaranya telah memiliki visa dan siap berangkat pada Desember 2021.

### Negara Lain yang Mendapat Izin Masuk ke Arab Saudi

■ Pakistan ■ Vietnam  
■ Brasil ■ Mesir ■ India



Sumber: Kemenag/QACA/Libang MI

"Calon jemaah Indonesia yang sudah menerima dosis lengkap yang diakui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni Sinovac, tetap diperkenankan melaksanakan umrah, tetapi mereka

harus melewati masa karantina selama tiga hari," tambah Ketua Umum GP Ansor itu.

"Setelah 48 jam (menjalani karantina), katanya lagi, akan dilakukan tes PCR. Jika dinyatakan negatif langsung dbolehkan melaksanakan umrah.

### Simulasi haji 2022

Kementerian Agama fokus menyukkseskan umrah pada awal Desember 2021. Pasalnya, penyelemparaan ibadah haji kecil itu dianggap sebagai simulasi kesiapan penyelenggaraan haji 2022.

"Jadi, kunci terbuka atau tidaknya haji di 1443 Hijriah nanti itu ya tergantung pada kita mampu melaksanakan ibadah umrah ini dengan baik," imbuh Yaqut.

Menurut politikus PKB itu hingga saat ini belum ada keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU dengan Arab Saudi.

Sementara itu, saat dihubung secara terpisah, Sekjen Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Arth Hanif, mengatakan pemerintah harus tetap mengambil peran sebagaimana regulasi yang diatur oleh undang-undang.

"Jangan mengambil peran yang domainnya swasta, pemerintah sebagai regulator, dan jangan terlalu jauh intervensi proses pelaksanaan umrah," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Artha, tidak perlu membuat skema khusus. Sebab, yang paling penting bahwa Kesthuri, pemerintah datang ke Arab Saudi dengan target dicapainya sebagaimana ketentuan yang ada. (MGNX-7)